



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦤꦏꦼꦢꦼꦫꦒꦶꦠꦼꦩꦼꦮꦠꦏꦼꦩꦼꦫꦶꦠꦤꦏꦼꦢꦼꦫꦒꦶꦠꦼꦩꦼꦮꦠ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613  
Website : jogjaprov.go.id Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

---

**CATATAN ATAS PELAKSANAAN APBD  
STATUS TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024**

**BALAI PELATIHAN KESEHATAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Berdasarkan laporan pelaksanaan program sub kegiatan melalui web Sengguh Pemda DIY pada alamat <http://sengguh.jogjaprov.go.id> dan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi timbal balik yang diselenggarakan pada Hari Selasa Tanggal 9 Juli 2024 maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

**A. Profil Belanja dan Rencana Pengadaan**

Jumlah Total Belanja yang dikelola*	: Rp5.766.247.700,00
Jumlah Belanja Operasi*	: Rp5.666.247.700,00
Jumlah Belanja Modal	: Rp100.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga*	: Rp-
Jumlah Belanja Transfer*	: Rp-
Jumlah Belanja Non Dana Keistimewaan	: Rp5.766.247.700,00
Belanja Dana Keistimewaan	: Rp-
Target Pendapatan**	: Rp3.953.200.000,00
Realisasi Pendapatan s/d Triwulan II	: Rp3.258.417.076,00
Jumlah Program	: 2 Program
Jumlah Kegiatan	: 7 Kegiatan
Jumlah Sub Kegiatan	: 12 Sub Kegiatan
Jumlah Paket Pengadaan Yang ditenderkan	: NIHIL

*\*) sumber dana ialah APBD, termasuk Dana Keistimewaan*

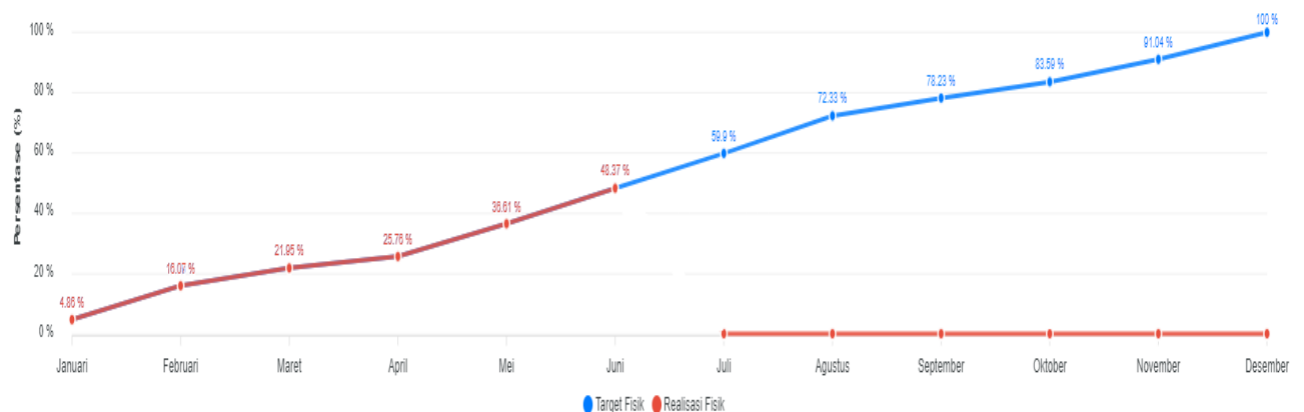
*\*\*\*) target pendapatan*

**B. Kinerja Sasaran Program (Eselon III) sampai dengan Triwulan II 2024 pada Balai Pelatihan Kesehatan DIY:**

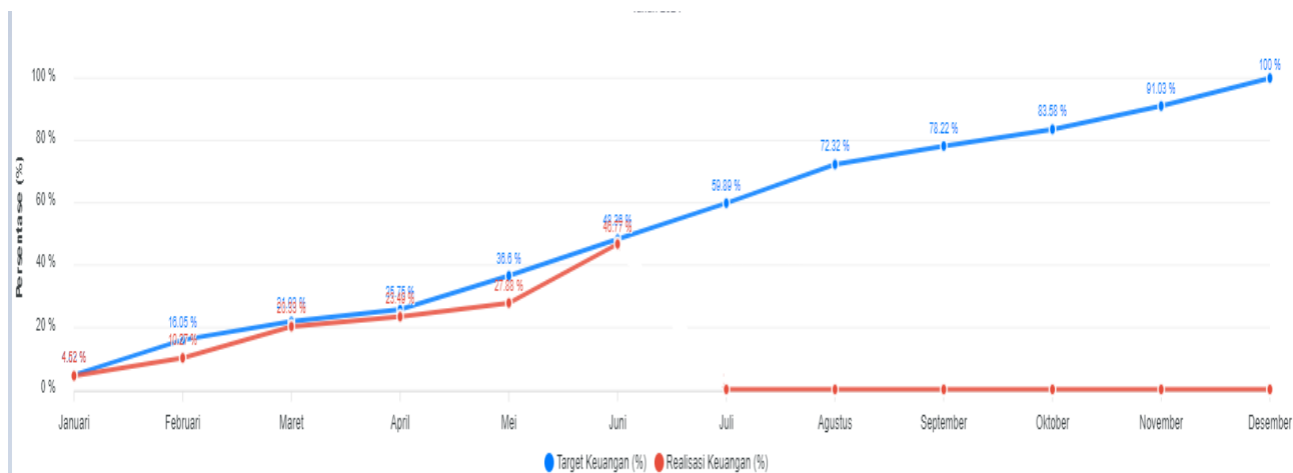
No	Program	Indikator	Capaian s.d. TW II 2024			Keterangan
			Target	Realisasi	% Cap	
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan (Bapelkes)	82	82	100	<p>Capaian realisasi dari indikator ini pada triwulan II 2024 sesuai dengan target yang ditetapkan.</p> <p>Indikator ini didapatkan dari hasil Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) dimana evaluasi ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara teratur dan sistematis untuk mengetahui penerapan hasil pelatihan oleh peserta dan peningkatan kinerja peserta di instansinya masing-masing setelah mengikuti pelatihan. Pengukuran ini dimulai dari pengembangan instrumen, pengumpulan, analisis data dan penafsiran temuan dengan tujuan untuk memperoleh umpan balik dan mengetahui efektivitas pelatihan yang dilaksanakan.</p> <p>Pada triwulan II tahun 2024 dilaksanakan dengan pengambilan data EPP untuk pelatihan yang dilaksanakan pada tahun 2024. Sebanyak 6 pelatihan telah memenuhi kriteria minimal 3 bulan setelah penyelenggaraan pelatihan melalui Sipandu (Sistem Informasi Pelatihan Tenaga Kesehatan Terpadu) untuk semua pelatihan. Pencapaian indikator ini didukung dengan adanya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan</li> <li>2. Komitmen dan kerjasama dari seluruh Pegawai Bapelkes</li> <li>3. Ketersediaan Anggaran</li> <li>4. Ketersediaan Sarana Prasarana yang mendukung terlaksananya aktivitas yang direncanakan</li> </ol> <p>Faktor penghambat pencapaian indikator ini adalah kurangnya semangat responden untuk berpartisipasi dalam Evaluasi Pasca Pelatihan.</p>
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah	87,49	89,13	101,87	<p>Target tahunan: 89,06</p> <p>Capaian realisasi dari indikator ini pada triwulan II sebesar 89,13 telah melebihi dari target yang ditetapkan atau sebesar 101,87% dari target.</p>

No	Program	Indikator	Capaian s.d. TW II 2024			Keterangan
			Target	Realisasi	% Cap	
		Daerah (Bapelkes)				<p>Sumber data: aplikasi Sengguh.</p> <p>Realisasi pada indikator ini diambil berdasarkan nilai rata-rata PKKI pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi setelah dilakukan desk timbal balik triwulan II dan telah dilakukan proses penilaian oleh tim asesor.</p> <p>Pencapaian indikator ini didukung dengan adanya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan</li> <li>2. Komitmen dan kerjasama dari seluruh Pegawai Bapelkes</li> <li>3. Ketersediaan Anggaran</li> <li>4. Ketersediaan Sarana Prasarana yang mendukung terlaksananya aktivitas yang direncanakan</li> </ol> <p>Faktor penghambat pencapaian indikator ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kurangnya SDM di Bapelkes</li> <li>2. sistem SIPD yang sering <i>error/ loading</i> lama</li> </ol>

### C. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Fisik Maupun Keuangan FISIK



## KEUANGAN



Kinerja **Balai Pelatihan Kesehatan DIY** pada triwulan II tahun anggaran 2024 dapat dilihat dari grafik kinerja fisik dan kinerja keuangan. Untuk kinerja fisik, menunjukkan tidak adanya deviasi antara target dengan realisasi fisik atau realisasi sudah sesuai dengan target. Sedangkan untuk kinerja keuangan, menunjukkan adanya deviasi yang relatif kecil antara target dengan realisasi keuangan sebesar 1,59%. Deviasi keuangan terjadi disebabkan adanya sisa belanja dan efisiensi anggaran karena penggunaannya bersifat menyesuaikan kebutuhan.

### D. Sub Kegiatan Yang Ditargetkan Selesai 100% baik Fisik maupun Keuangan s.d. Juni Tahun 2024

No.	Program/Sub Kegiatan	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Target Keu (%)	Realisasi Keu (%)	Keterangan
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	100	100	83,45	Adanya efisiensi sisa belanja.
2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	100	100	100	-

### E. Sub Kegiatan Dengan Deviasi Fisik $\geq$ 5%, Keuangan $\geq$ 10%

No.	Nama Sub Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
<b>Deviasi Fisik <math>\geq</math> 5 %</b>				
--	NIHIL	--	--	--
<b>Deviasi Keuangan <math>\geq</math> 10 %</b>				
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67,88	52,20	menyesuaikan dengan kebutuhan.
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	83,45	adanya efisiensi sisa belanja.

### F. Progres Pelaksanaan Kegiatan bersumber Dana Keistimewaan

**Balai Pelatihan Kesehatan DIY** tahun 2024 tidak mengampu program dan kegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan.

**G. Progres Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi**

Pada Tahun 2024 **Balai Pelatihan Kesehatan DIY** tidak memiliki paket pengadaan yang dilaksanakan melalui tender dan pengadaan langsung yang dilimpahkan ke BLP.

Untuk pengadaan dan pencatatan transaksi melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Balai Pelatihan Kesehatan DIY tidak mengalami kendala. Begitu juga terkait dengan pelaksanaan P3DN sampai dengan triwulan II pada Balai Pelatihan Kesehatan DIY tidak mengalami kendala. Adapun realisasi belanja TKDN Balai Pelatihan Kesehatan DIY sampai dengan triwulan II adalah mencapai Rp1.634.581.213,00 atau sebesar 50,29% dari total pagu.

**H. Pengendalian Internal**

**Balai Pelatihan Kesehatan DIY** telah melakukan pengendalian internal yang terjadwal secara rutin setiap minggu sekali dipimpin oleh Kepala Balai. Pengendalian internal telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari Kepala Balai, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan, dan Kepala Seksi Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pelatihan.

Pembahasan pengendalian internal yang dilakukan Kepala Balai di triwulan II diantaranya pembahasan capaian realisasi target pendapatan, evaluasi penerapan budaya kerja SATRIYA, persiapan akreditasi, proses pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Selanjutnya, pembahasan yang dilakukan oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan pelatihan diantaranya adalah pembahasan analisis kebutuhan pelatihan, dan kelengkapan sarana prasarana pelatihan. Kepala Seksi Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pelatihan membahas kurikulum pelatihan dan rencana kegiatan bulanan di internal seksi. Sementara itu, Kepala Sub Bagian Tata Usaha membahas terkait capaian realisasi kinerja baik fisik dan keuangan di Balai, dan kedisiplinan pegawai.

Pengendalian internal tersebut telah terekam dengan cukup baik pada sistem aplikasi Si-Informan (<https://si-informan.jogjaprov.go.id>) yang telah terintegrasi dengan Sengguh (<https://sengguh.jogjaprov.go.id>).

**I. Dukungan Lintas Sektor**

Sesuai dengan cascading kinerja Pemda DIY yang telah mengakomodir *performance based budgeting*, capaian pembangunan Pemda DIY memerlukan dukungan kolaborasi lintas sektor/OPD. Mempertimbangkan hal tersebut, seluruh unit kerja dituntut memberikan kontribusi yang nyata terhadap upaya pencapaian kinerja Pemda. Selanjutnya berdasarkan *self assessment* yang dilakukan pada **Balai Pelatihan Kesehatan DIY**, terlihat bahwa upaya kolaborasi lintas sektor/OPD terutama dalam upaya mendukung capaian kinerja Pemda **Kualitas**

**SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan dan Meningkatnya Good Governance**, telah dapat mendefinisikan program/kegiatan yang terkait dengan Lintas Sektor.

Dalam upaya mendukung Sasaran Pemda **Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan, Balai Pelatihan Kesehatan DIY** telah mendefinisikan program/kegiatan terkait lintas sektor. Sebagai contoh, Balai Pelatihan Kesehatan DIY melakukan kerja sama dengan Dinkes DIY, Dinkes Kab/Kota, Rumah Sakit, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Puskesmas, Sekolah, Kalurahan. Pelibatan lintas sektor tersebut terkait dalam proses pelaksanaan dimana lintas sektor berkontribusi dalam merekomendasikan narasumber/pengajar/instruktur/peserta sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan dalam kurikulum pelatihan. Selain itu, pelibatan lintas sektor juga dilakukan dengan instansi pusat. peran instansi pusat melalui Direktorat Peningkatan Mutu Kesehatan yaitu dengan melakukan Survei Akreditasi Institusi secara berkala ke **Balai Pelatihan Kesehatan DIY** untuk memberikan penilaian atau pengakuan **Balai Pelatihan Kesehatan DIY** selaku instansi penyelenggara pelatihan terakreditasi. Selanjutnya Bapelkes DIY melakukan pemenuhan terhadap semua ketentuan akreditasi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

Dalam upaya mendukung sasaran Pemda Meningkatnya Good Governance, Balai Pelatihan Kesehatan DIY telah mendefinisikan kerja sama lintas sektor melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi. Sebagai contoh, Balai Pelatihan Kesehatan DIY berkomitmen menerapkan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), dimana dalam proses pencanangannya bekerja sama dengan Biro Organisasi dan Inspektorat. Selain itu, DPAD DIY dan UIN Sunan Kalijaga memberikan pendampingan dalam pengelolaan digital library yang terakreditasi. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Publik di Balai Pelatihan Kesehatan, MMTC Yogyakarta menyediakan mahasiswa magang untuk menerapkan *public relation* di perkantoran.

**J. Progres Pelaksanaan Hibah/ Bansos Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II**

Pada tahun 2024 **Balai Pelatihan Kesehatan DIY** tidak mengampu hibah/bansos.

**K. Progres Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik/ Non Fisik Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II**

Pada tahun 2024 **Balai Pelatihan Kesehatan DIY** tidak mengampu program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

**L. Progres Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan**

Pada tahun 2024 **Balai Pelatihan Kesehatan DIY** tidak mengelola anggaran yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan

**M. Progres Pelaksanaan Kegiatan OPD untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II**

Pada tahun 2024 **Balai Pelatihan Kesehatan DIY** tidak mengampu pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan.

**N. Gambaran Umum Kinerja Kapasitas Organisasi (*learning & growth perspective*)**

No	Komponen	Hasil Penilaian	Penjelasan
1	Kualitas Lintas Sektor	Sangat Baik	<b>Balai Pelatihan Kesehatan DIY</b> telah mengidentifikasi peran lintas sektor dengan lengkap dalam mendukung pencapaian sasaran Pemda termasuk sumberdaya yang digunakan. Kontribusi OPD pada perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pemantauan/evaluasi mampu dijelaskan dan dijabarkan secara lengkap, akurat dan detail. Bukti kegiatan lintas sektor juga telah disampaikan dalam link dan secara jelas menggambarkan kegiatan lintas sektor yang sudah dilakukan. Kolaborasi yang dilakukan dengan <i>stakeholder</i> terkait sebagai upaya pencapaian sasaran Pemda DIY “ <b>Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat Diandalkan</b> ” dan “ <b>Meningkatnya Good Governance</b> ” sudah disampaikan dukungan sarana dan prasarana serta dukungan anggarannya, termasuk penguangan dalam sub kegiatan.
2	Kualitas Logframe	Baik	<i>Logframe</i> telah disusun pada semua program dengan baik, lengkap, dapat dipahami, berjenjang di semua level dan sudah menyampaikan CSF di level input, output maupun outcome. Namun demikian, perlu diperjelas pada setiap asumsi eksternal yang disampaikan agar mampu menjelaskan dukungan dan pengaruh langsung dalam pencapaian target pada masing-masing jenjang.
3	Kualitas KAK	Baik	Semua kegiatan sudah disusun KAK-nya, sangat jelas, mudah dipahami, setiap output memiliki keterkaitan. Latar belakang kegiatan telah dijelaskan cukup tajam, jadwal pelaksanaan kegiatan sudah jelas, dan dasar penjadwalan kegiatan telah disampaikan dengan jelas. Untuk lokasi perlu diperinci, lokasi disesuaikan dengan tempat pelaksanaan kegiatan sampai ke <i>locus</i> terkecil.
4	Kualitas ROPK	Baik	Semua kegiatan sudah memiliki ROPK fisik maupun keuangan, serta mampu menggambarkan proses pencapaian output secara jelas. Telah dijelaskan secara detail setiap sub aktifitas untuk pelaksanaan sub kegiatan baik dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Namun demikian, masih terdapat ROPK Fisik yang belum menggunakan bahasa pencapaian output pada

No	Komponen	Hasil Penilaian	Penjelasan
			sub kegiatan Peningkatan kompetensi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
5	Inovasi/ Kebaruan	Baik	<p>Pada triwulan II tahun 2024 Balai Pelatihan Kesehatan DIY telah melakukan update sejumlah inovasi yang mendukung pencapaian output, perbaikan internal, dan pelayanan di semua sub kegiatan. Beberapa inovasi yang dilakukan di triwulan II diantaranya pada sub kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan terkait pelaksanaan Evaluasi Pasca Pelatihan melalui aplikasi SIPANDU.</p> <p>Capaian inovasi Balai Pelatihan Kesehatan DIY dapat dioptimalisasi baik yang lingkungannya internal maupun eksternal yang dapat mendukung dan mempermudah dalam peningkatan kinerja serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inovasi bisa berupa : inovasi konseptual (perbaikan mindset dan kinerja ASN), inovasi proses (perubahan dalam cara mengelola layanan publik), inovasi pelayanan (inovasi yang berdampak pada pelayanan pelayanan), dan inovasi sistem (perubahan dalam sistem).</p>

#### O. Kinerja Sub Kegiatan OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024

Kinerja sub kegiatan **Balai Pelatihan Kesehatan DIY** sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

No	Program/Sub Kegiatan	Nilai
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>89,13</b>
1.1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	87,20
1.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	88,60
1.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	88,60
1.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88,60
1.5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87,20
1.6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	88,60
1.7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88,60
1.8	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93,60
1.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	92,20
1.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	88,60
1.11	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	88,60
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	
2.1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	85,00
	<b>Rata-rata</b>	<b>87,06</b>



**P. Catatan:**

Berdasarkan uraian data kinerja **Balai Pelatihan Kesehatan DIY** Triwulan II Tahun 2024 yang telah terverifikasi melalui desk timbal balik dapat disampaikan catatan sebagai berikut :

1. Pada aspek pelaksanaan anggaran sub kegiatan, Balai Pelatihan Kesehatan DIY telah melaksanakan sub kegiatan dengan baik meskipun masih terdapat deviasi keuangan sebesar 1,59% disebabkan adanya efisiensi anggaran karena sisa belanja dan adanya sisa anggaran karena penggunaannya bersifat menyesuaikan kebutuhan. Sedangkan untuk kinerja fisik, sampai dengan akhir Triwulan II tidak menunjukkan adanya deviasi.
2. Kinerja Program Eselon III pada Balai Pelatihan Kesehatan DIY telah melaporkan 2 program yaitu: 1) Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan indikator Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan; 2) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan indikator Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Pada indikator Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan, dari target 82 di Triwulan II, telah tercapai sebesar 82 atau sebesar 100%. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi oleh Balai Pelatihan Kesehatan DIY yaitu kurangnya semangat alumni peserta pelatihan yang berpartisipasi dalam Evaluasi Pasca Pelatihan. Selain itu dari sisi SDM di Balai Pelatihan Kesehatan sendiri, masih terdapat kekurangan jumlah widyaiswara.

Sementara itu, pada indikator Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target tahunan sebesar 89,06 yang dibreakdown di tiap triwulan, target di triwulan II sebesar 87,49 dan telah tercapai sebesar 89,13 atau dengan persentase capaian 101,87%.

3. Progres pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, **Balai Pelatihan Kesehatan DIY** tidak memiliki paket pengadaan melalui sistem tender maupun pengadaan langsung yang dilimpahkan ke BLP di tahun 2024. Untuk pengadaan dan pencatatan transaksi melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Balai Pelatihan Kesehatan DIY tidak mengalami kendala. Begitu juga terkait dengan pelaksanaan P3DN sampai dengan triwulan II pada Balai Pelatihan Kesehatan DIY tidak mengalami kendala. Adapun realisasi belanja TKDN Balai Pelatihan Kesehatan DIY sampai dengan triwulan II adalah mencapai Rp1.634.581.213,00 atau sebesar 50,29% dari total pagu.
4. Pelaksanaan pengendalian internal, sudah terjadwal secara rutin baik pada level kepala Balai maupun Kepala Seksi dan Sub Bagian. Pengendalian internal dilakukan untuk pencermatan secara detail terhadap persiapan maupun progress dari masing-masing kegiatan untuk merumuskan Solusi apabila terdapat permasalahan
5. Catatan pelaksanaan lintas sektor sudah lengkap mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan pemantauan/evaluasi. Kerjasama lintas sektor yang dilakukan **Balai Pelatihan Kesehatan DIY** dalam upaya mendukung capaian 2 sasaran Pemda, yaitu pada sasaran “**Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan**” dan “**Meningkatnya Good**

**Governance". Balai Pelatihan Kesehatan DIY** sudah mampu mengidentifikasi peran keterlibatan masing-masing pihak dalam proses pelaksanaan kerjasama. Bukti dokumentasi pelaksanaan kerja sama telah tersampaikan dengan baik dan telah menunjukkan secara detail dalam setiap berkas yang disampaikan.

6. Penyusunan *Logframe*, ROPK, KAK, dan inovasi yang disampaikan secara umum sudah baik. Pada penyusunan logframe, perlu diperjelas pada setiap asumsi eksternal yang disampaikan agar mampu menjelaskan dukungan dan pengaruh langsung dalam pencapaian target pada masing-masing jenjang. Untuk penyusunan KAK, telah disusun KAK dengan jelas, mudah dipahami di semua sub kegiatan namun untuk lokasi perlu diperinci, lokasi disesuaikan dengan tempat pelaksanaan kegiatan sampai ke lokus terkecil. Pada penyusunan ROPK, masih terdapat ROPK Fisik yang belum menggunakan bahasa pencapaian output yaitu pada sub kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Sedangkan pada inovasi, Balai dapat mengoptimalkan capaian inovasi dengan terus menciptakan inovasi baik yang lingkungannya internal maupun eksternal yang dapat mendukung dan mempermudah dalam peningkatan kinerja serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
7. Pada tahun 2024, Balai Pelatihan Kesehatan DIY memiliki target pendapatan sebesar Rp3.953.200.000,00. Sampai dengan Triwulan II 2024, realisasi pendapatan yang diperoleh jauh melebihi target Triwulan II, yaitu sebesar Rp3.258.417.076,00 atau sebesar 82,42% dari target yang ditetapkan. Pendapatan tersebut berasal dari Retribusi pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan, retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa, kerja sama dengan pihak lain, dan pendapatan lain-lain. Balai Pelatihan Kesehatan DIY dapat memperoleh pendapatan jauh melampaui target karena terus pro aktif melakukan pemetaan kebutuhan pelatihan kesehatan dari berbagai pihak termasuk Dinas Kesehatan Kab/Kota. Setelah memperoleh kebutuhan pelatihan, Balai melakukan penyiapan paket pelatihan untuk ditawarkan dan sosialisasi kepada Dinkes Kab/Kota dengan mekanisme jemput bola. Selain itu, Balai juga mendampingi Dinkes Kab/Kota saat desk bersama Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan RI.

Ketercapaian pendapatan yang diperoleh di Triwulan II menjadi dasar untuk menaikkan target pendapatan pada anggaran perubahan. **Balai Pelatihan Kesehatan DIY** memiliki pangsa pelatihan yang besar baik dari luar daerah maupun dalam DIY yang dapat meningkatkan pendapatan. Untuk itu diperlukan langkah antisipasi jika terjadi lonjakan peserta pelatihan.

SDM di Balai Pelatihan Kesehatan DIY menjadi penting untuk dipenuhi, sedangkan keterbatasan SDM Widyaiswara masih menjadi kendala di **Balai Pelatihan Kesehatan DIY**. Selain Widyaiswara, SDM pelaksana pun juga semakin banyak kebutuhannya, karena dengan semakin banyaknya pelatihan maka pelayanan yang diberikan semakin banyak. Sementara

itu, belum ada regulasi terkait perekrutan tenaga BLUD. Adanya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, BLUD tidak dapat lagi merekrut tenaga non ASN.

Penyediaan sarana prasarana juga menjadi perhatian dalam upaya peningkatan pelayanan pelatihan di **Balai Pelatihan Kesehatan DIY**. Pemenuhan terhadap sarana prasarana seperti kamar asrama menjadi hal yang perlu diperbaiki.

8. Secara keseluruhan nilai kinerja pelaksanaan sub kegiatan pada **Balai Pelatihan Kesehatan DIY** adalah **87,06** (kategori **Baik**). Meskipun begitu nilai tersebut masih dapat dioptimalkan lagi terutama terhadap inkonsistensi terutama di sisi keuangan. Pelaksanaan program/kegiatan yang baik diharapkan dapat secara optimal dalam mendukung dan berkorelasi pada pencapaian sasaran strategis yang menjadi kinerja balai.

#### **Q. Rekomendasi**

Berdasarkan catatan pelaksanaan sampai dengan triwulan II/2024 tersebut di atas, maka kami memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. **Terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan**, output sub kegiatan hingga triwulan II tahun 2024 agar dapat diperhatikan terhadap manfaat dan keberlanjutannya. Kualitas pelayanan kepada masyarakat senantiasa perlu ditingkatkan. Selanjutnya, agar: (1) memperbaiki kualitas Logframe, KAK dan ROPK agar lebih rinci dan lengkap supaya menggambarkan secara jelas terkait sub kegiatan beserta tahapan dalam proses pencapaian output; (2) terus menciptakan inovasi dimulai dari hal yang kecil pada level kegiatan secara berkelanjutan, baik untuk internal balai maupun yang berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. Inovasi bisa berupa : inovasi konseptual (perbaikan mindset dan kinerja ASN), inovasi proses (perubahan dalam cara mengelola layanan publik), inovasi pelayanan (inovasi yang berdampak pada pelayanan pelayanan), dan inovasi sistem (perubahan dalam sistem); (3) Dukungan lintas sektor yang telah baik hendaknya dipertahankan dan ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan (4) Pelaksanaan kegiatan di Balai Pelatihan Kesehatan DIY pada triwulan selanjutnya lebih memperhatikan konsistensi antara target dengan realisasi sebagaimana telah direncanakan, mengacu pada ROPK Fisik dan ROPK Keuangan.
2. **Terhadap kinerja sasaran program (eselon III)**, diharapkan setiap triwulan dapat terus memiliki progres meningkat dan tetap terus memperhatikan kualitas output dalam ketercapaian pelaksanaan kegiatan sehingga output tersebut dapat berfungsi dengan baik dan dapat secara optimal mendukung capaian sasaran program. Monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja program perlu terus dilakukan, sehingga Upaya pencapaian dapat dikontrol dengan baik termasuk mengidentifikasi faktor yang dimungkinkan menjadi penghambat capaian. Agar akuntabilitas dapat terlihat, dukungan data dan mekanisme pengukuran kinerja perlu didokumentasikan secara baik.

3. **Terhadap fungsi pengendalian internal Balai Pelatihan Kesehatan DIY**, pelaksanaan yang sudah terjadwal secara rutin baik pada level pimpinan maupun tiap bidang pengampu dan melakukan pencermatan secara detail terhadap progres dari masing-masing kegiatan untuk merumuskan solusi apabila terdapat permasalahan perlu untuk terus dilanjutkan. Pengendalian internal perlu dilakukan tidak hanya terkait pembinaan SDM, namun juga dalam rangka upaya peningkatan kualitas layanan yang diberikan dan memastikan seluruh sub kegiatan berjalan dengan baik untuk mendukung capaian kinerja program serta sasaran OPD maupun dalam rangka dukungan terhadap kinerja Pemda, melalui penciptaan budaya kinerja di lingkungan instansi. Untuk triwulan selanjutnya, informasi terkait evaluasi hasil capaian *outcome* program/sasaran juga dapat disampaikan sebagai bahan evaluasi internal.
4. Rekomendasi pelaksanaan lintas sektor pada **Balai Pelatihan Kesehatan DIY** hendaknya terus dipertahankan/ditingkatkan dengan menggandeng lebih banyak *stakeholder* yang terlibat dan sasaran kegiatan. Pendetailan terhadap pelaksanaan lintas sektor di setiap triwulan perlu dilakukan untuk dapat melihat pelaksanaan lintas sektor dan detail sasaran pada setiap triwulan. Dengan demikian, diharapkan dapat tergambar dengan jelas lintas sektor dalam mendukung sasaran Pemda.
5. **Terhadap proses pengadaan barang dan jasa**, berdasarkan hasil desk timbal balik TW I dan menindaklanjuti Surat Sekretariat Daerah Perihal Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Triwulan II Tahun 2024 dengan Nomor 00.3.6/4224 Tertanggal 2 Juli 2024, dapat disampaikan arahan dan rekomendasi umum untuk menjadi perhatian Perangkat Daerah DIY antara lain:
  - a. PPK menyelesaikan seluruh proses pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2024 melalui SPSE (upload dokumen, berita acara serah terima, sampai dengan pemberian penilaian kinerja penyedia).
  - b. PPK memperhatikan tata kala waktu pemanfaatan barang/jasa terhadap kebutuhan waktu proses pemilihan penyedia. Waktu yang dibutuhkan untuk proses tender minimal adalah 30 hari kalender, sedangkan untuk seleksi membutuhkan waktu 60 hari kalender.
  - c. PA/KPA memerintahkan PPK dan tim untuk melakukan pengendalian kontrak dan memastikan penyedia melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
6. Terhadap keterbatasan SDM, untuk dapat mengoptimalkan SDM yang ada. Koordinasi dan usulan formasi baik Widyaiswara maupun pelaksana juga terus diupayakan ke Badan Kepegawaian Daerah untuk dilakukan Pemenuhan. Selain itu, agar terus menindaklanjuti pelaksanaan lintas sektor yang telah dilakukan dengan stakeholder terkait narasumber dalam pelatihan.

Secara umum kami sampaikan apresiasi dan terima kasih untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang sudah berjalan baik. Selanjutnya terhadap beberapa kendala/masalah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan selama Triwulan II Tahun 2024, agar dapat dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan pada triwulan berikutnya berjalan lebih optimal. Penguatan kolaborasi dengan semua pihak agar terus dilakukan, sebagai upaya bersama mendukung capaian kinerja Pemda.

Demikian disampaikan untuk dapat dijadikan perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Juli 2024

**a.n. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
SEKRETARIS DAERAH**



**Drs. BENY SUHARSONO, M.Si.**  
**NIP. 196505121986021002**